

80

26/09
/6

PERPUSTAKAAN IKK
FEMA - IPB

Makalah Seminar

**PENGINTEGRASIAN ISU GENDER
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN**

Oleh:

Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.
Staf Pengajar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor

Disampaikan Pada Lokakarya:
Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan
Menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan
Kampus IPB Darmaga- 10 September 2007



**DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

BOGOR 2009		PERPUSTAKAAN - IKK	
Terima Dari			
REG : 2009 010 0248	Sumbangan Tambahan Perakuran		
TGL : 1/09 /10.....			
No. KLAS.		

DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN.....	1
LANDASAN RASIONAL STRATEGI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN.....	2
LANDASAN HUKUM.....	5
ISU-ISU GENDER PADA MASALAH EKONOMI KEMISKINAN.....	5
Isu Akses Terhadap Informasi Pasar dan Sumberdaya Serta Teknologi.....	5
Isu Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan.....	6
Isu Kontrol terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.....	6
Isu Manfaat terhadap Pembangunan.....	7
CIRI-CIRI KEBIJAKAN/ PROGRAM PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN YANG RESPONSIF GENDER.....	7
STRATEGI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN RESPONSIF GENDER MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN.....	8
Perencanaan dan Budgeting.....	8
Pelaksanaan.....	10
Contoh Proses Pengintegrasian Isu Gender Ke Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan.....	14
Teknik Monitoring dan Evaluasi.....	15
Program-Program Peningkatan Ekonomi Perempuan	
PENUTUP.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	17
CURRICULUM VITAE PENYAJI.....	19

PENDAHULUAN

Secara aktual, masih banyak penduduk Indonesia yang tergolong dalam kategori miskin, dan sebagian besar dari jumlah tersebut berada di perdesaan. Fenomena kemiskinan di Indonesia semakin dirasakan peningkatannya baik kuantitas maupun kualitasnya setelah krisis ekonomi nasional sejak pertengahan tahun 1998. Permasalahan keluarga yang ada saat ini didominasi oleh adanya masalah sosial ekonomi (*social economics problems*) atau kemiskinan inilah yang mengakibatkan masalah keluarga lainnya seperti perceraian, konflik antar anggota keluarga, kekerasan dalam rumahtangga, kenakalan remaja, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi nasional selama ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator utamanya adalah tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia diantaranya ada pada pasar kerja, yaitu adanya akses perempuan terhadap kesempatan yang mendatangkan pendapatan lebih rendah daripada akses lelaki. Perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk bekerja, dan sebaliknya lebih besar kemungkinannya untuk tidak dipekerjakan. Perempuan cenderung mendapatkan upah lebih kecil daripada lelaki.

Permasalahan utama pembangunan dicerminkan oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin. Selama kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara drastis dari mulai 40,1 persen menjadi 11,3 persen. Namun demikian, jumlah penduduk miskin meningkat setelah krisis ekonomi nasional sejak pertengahan Tahun 1997. Masih besarnya jumlah penduduk miskin pembangunan penduduk miskin Indonesia adalah 37,3 juta (18,9%) pada tahun 2000, 37,1 juta (18,4%) pada tahun 2001, 38,4 juta (18,2%) pada tahun 2002, dan 37,3 juta (17,4%) pada tahun 2003. (Menkokesra, 2004). Pada tahun 2004 dan 2005 persentase penduduk miskin mengalami penurunan yaitu menjadi 16,7 % dan 16,0 % atau 35,1 juta orang. Menurut BPS (2007), penduduk miskin pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 17,8% atau 39,05 juta orang.

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (*vulnerable group*) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik (Suharto, 2004). Berkaitan dengan komitmen Internasional yang terwujud dalam kesepakatan *Millenium Development Goals (MDGs)* di atas, maka Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberikan target bahwa jumlah penduduk miskin harus dapat diturunkan hingga separuhnya dalam waktu 25 tahun ini.

Sehubungan dengan masalah kemiskinan ini, Pemerintah Indonesia telah banyak melaksanakan program untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan berbagai strategi dan pendekatan. Namun demikian, pada umumnya program tersebut berupa pemberian permodalan dan pembangunan infrastruktur yang padat karya dan cenderung pada pelaku ekonomi secara umum saja. Sebagai hasil dari strategi penyusunan program yang cenderung sektoral, maka hasilnya ternyata masih belum menyentuh akar permasalahan penyebab kemiskinan yang salah satunya bermuara ke masalah kesenjangan gender. Masalah rendahnya produktivitas perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga sama sekali belum disentuh secara mendetail dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan program yang dapat menyentuh permasalahan kesenjangan gender serta memberikan penekanan pada pengembangan ekonomi keluarga, maka diperlukan suatu strategi tertentu yang memerlukan pemetaan tentang perkembangan gender dan

cara yang arif dalam mensosialisasikan pada masyarakat. Apabila strategi penurunan tingkat kemiskinan berperspektif gender dapat disusun dengan baik melalui pengembangan ekonomi keluarga berbasis kehidupan masyarakat pedesaan, maka diharapkan hasilnya akan lebih baik dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi yang dilaksanakan sebelumnya.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran proses perlunya integrasi isu-isu gender dalam kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di perkotaan dan pedesaan. Tahapan pengintegrasian isu gender ke dalam kebijakan/program penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan bagi para pengambil kebijakan, para penyuluh/pelatih/pendamping masyarakat dan para akademisi agar dapat bekerjasama secara holistik untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Secara garis besar, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:

1. Apa dan bagaimana cara mengetahui isu gender mengenai kemiskinan?
2. Bagaimana proses dan tahapan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan? (Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi).
3. Apa ciri-ciri program yang responsif gender?

LANDASAN RASIONAL STRATEGI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN

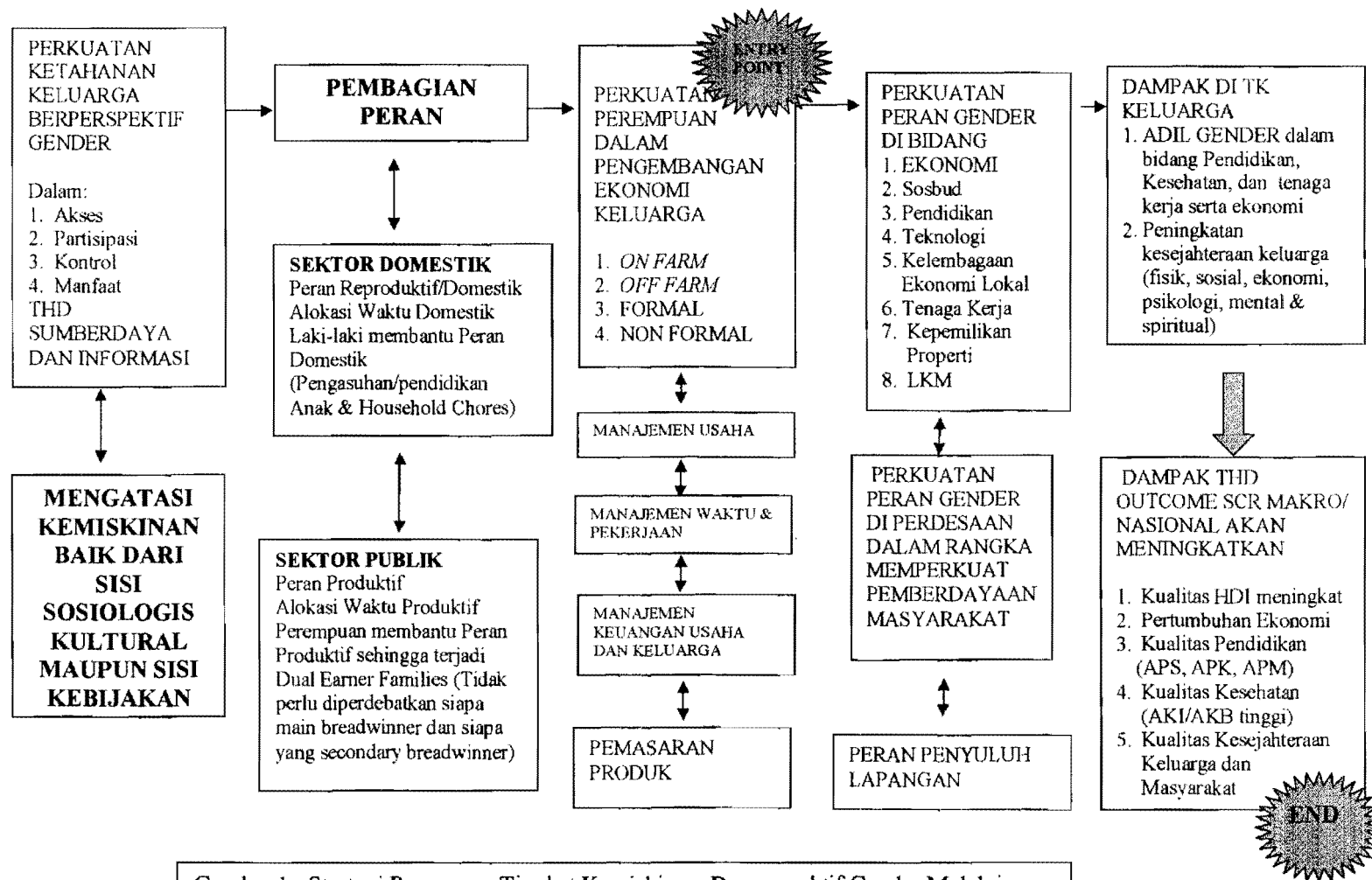
Gambar 1 menyajikan proses pemikiran rasional yang melandasi pentingnya "Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan Berperspektif Gender Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan" sebagai berikut:

1. Pemikiran yang rasional diawali dari konsep keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan sebagai insitusi utama dan pertama bagi pendidikan anak. Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender didasari pada kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap penggunaan sumberdaya dan memperoleh informasi untuk mencapai kesejahteraan keluarga.
2. Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender ini dinilai paling cocok pada kondisi saat ini untuk mengatasi kemiskinan baik dari sisi sosiologis kultural maupun sisi kebijakan. Untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi di tingkat keluarga dan masyarakat, maka harus melakukan pendekatan dari sisi sosiologis kultural secara bijak dan gradual berkaitan dengan pembagian peran gender dalam berbagai aktivitas baik publik maupun domestik serta sosial kemasyarakatan. Peran gender di sektor domestik melibatkan peran reproduktif/ domestik yang menyangkut aktivitas manajemen sumberdaya keluarga (materi, non materi dan waktu, pekerjaan dan keuangan), misalnya laki-laki membantu peran domestik dalam pengasuhan/ pendidikan Anak dan *Household Chores*.
3. Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender menyangkut peran gender pada berbagai aktivitas termasuk di sektor publik yang memerlukan alokasi waktu produktif yang melibatkan peran produktif perempuan sehingga terjadi *Dual Earner Families* (Tidak perlu diperdebatkan siapa *a main breadwinner* dan siapa *yang a secondary breadwinner*).
4. Perkuatan perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga baik pada *on farm, off farm*, formal, maupun non formal merupakan **ENTRY POINT** untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara umum (pendidikan, kesihatan, ketahanan pangan) agar keluar dari lingkaran

kemiskinan melalui manajemen usaha, manajemen waktu dan pekerjaan, manajemen keuangan usaha dan keluarga, serta pemasaran produk.

5. Selanjutnya, di tingkat keluarga dilakukan perkuatan peran gender di segala bidang yang diawali dari perkuatan peran ekonomi, kemudian sosial budaya, pendidikan, penguasaan teknologi, perkuatan peran perempuan pada kelenyagaan ekonomi lokal, tenaga kerja, dan kepemilikan properti serta keterlibatan pada lembaga keuangan mikro.
6. Perkuatan peran gender di tingkat keluarga ini diharapkan berdampak pada perkuatan peran gender di perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di segala bidang. Pemberdayaan ini tentu saja akan terwujud apabila peran para petugas penyuluh lapangan bekerja maksimal dalam melakukan pendampingan pada masyarakat.
7. Perkuatan gender di tingkat keluarga diharapkan berdampak pada keadaan ADIL GENDER dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan ekonomi, serta pada peningkatan kesejahteraan keluarga (fisik, sosial, ekonomi, psikologi, mental dan spiritual).
8. Perkuatan gender di tingkat keluarga diharapkan berdampak pada *outcome* secara makro/nasional, yaitu meningkatkan kualitas *Human Development Index* (HDI); pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan (APS, APK, APM), kualitas kesehatan (AKI/AKB), dan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat .

Oleh karena itu konsep gender dan keluarga tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan secara kausal. Dengan demikian perlu adanya “Gender Awareness dalam Keluarga” dengan mempertahankan keutuhan keluarga sebagai suatu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun strategi dan dinamika pemberdayaan gender pada tahapan individu, keluarga, dan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan lokal dengan mempertimbangkan *local wisdom*, *endogenous knowledge*, dan norma serta adat setempat. Namun demikian, nilai-nilai atau norma-norma yang kurang sesuai dengan perkembangan jaman, dapat dilakukan modifikasi perubahan sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan akses perempuan pada pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta pada informasi pekerjaan. Akhirnya, karakteristik kehidupan perdesaan merupakan landasan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi berperspektif gender dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam mencapai tujuan tersebut, langkah pertama adalah melakukan transformasi keadaan dari keadaan saat ini yang bermasalah menuju keadaan masa datang yang diinginkan melalui penyusunan program penurunan kemiskinan yang responsif gender.



Gambar 1. Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan Berperspektif Gender Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam pelaksanaan integrasian isu gender dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi perempuan adalah sebagai berikut ¹⁶⁾:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A, 18B, 27, 28, 28A, 28C, 28F, 28H, 33, dan 34.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
11. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Menteri Negara.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
13. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 28A Tahun 2005, Nomor 1/PB/2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.
15. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan.
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor P.01/MENEG.PP/V/2005 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

ISU-ISU GENDER PADA MASALAH EKONOMI DAN KEMISKINAN

Isu Akses Terhadap Informasi Pasar dan Sumberdaya serta Teknologi ^{14, 16)}

1. Penyebarluasan informasi yang tidak seimbang menyebabkan tingkat keterjangkauan informasi dan akses masyarakat terhadap informasi menjadi terbatas. Tingkat akses terhadap informasi tentang usaha dan kreditpun berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih dapat mengakses informasi karena biasanya lebih menguasai teknologi informasi dan memiliki mobilitas yang lebih baik. Untuk menjangkau kaum perempuan,

harus menggunakan saluran-saluran informasi yang dapat diakses oleh mereka, seperti pusat-pusat kegiatan masyarakat, serikat-serikat dagang, kelompok-kelompok perempuan dan kelompok-kelompok keagamaan.

2. Kekakuan sistem administrasi, hukum, dan kebijakan yang bias gender, dapat menghilangkan hak-hak perempuan dalam mengakses sumberdaya dan informasi serta teknologi.
3. Perempuan yang melakukan usaha atau bisnis mikro dan usaha kecil seringkali kurang mendapatkan akses pasar, yang meliputi keinginan, kebutuhan dan kesukaan konsumen yang kemudian berhubungan dengan aspek kualitas atau mutu produk yang dihasilkan dan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk.
4. Kelompok pengusaha perempuan mempunyai kendala dalam mengakses informasi pasar dan teknologi sehingga kurang dapat bersaing dengan pengusaha lainnya.

Isu Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan^{14, 16)}

1. Ada kesenjangan tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam forum-forum perencanaan. Konsekuensinya, suara perempuan sering terkalahkan oleh suara mayoritas peserta forum yang laki-laki.
2. Hambatan struktural, sosial, dan budaya merupakan penyebab minimnya partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan hanya mengundang tokoh masyarakat maka yang akan terpilih kembali laki-laki, karena relasi sosial yang masih timpang serta kultur yang masih sangat patriarki.
3. Tingkat lengkapnya informasi dan keterbatasan akses maupun kesenjangan akses terhadap informasi menyebabkan terjadinya variasi tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan yang akan berpengaruh terhadap perumusan kebijakan dan program pembangunan.
4. Perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilandasi oleh kekuatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga yang rendah.
5. Pemetaan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu data base yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana pembangunan. Hal ini penting agar dalam penyusunan rencana tindak mengangkat laki-laki dan perempuan dari akar peran sosial dan ekonominya. Disamping itu juga untuk meminimalisir kehilangan yang lebih jauh eksese negatif (kehilangan mata pencarian) dari pelaksanaan rencana pembangunan perkotaan dan perumahan.
6. Kurangnya sosialisasi terutama yang dilakukan pemerintah, seperti upaya yang tidak berlanjut dan kapasitas terbatas dan hanya bersifat simbolis, menyebabkan terbatasnya jangkauan dan partisipasi perempuan dalam usaha mikro/kecil.

Isu Kontrol terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan^{14, 16)}

1. Perempuan dan laki-laki harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan diberikan hak yang sama untuk memperoleh fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh program pembangunan.
2. Perlu diberikannya *affirmative action* bagi kaum perempuan yang berstatus janda dan keluarga yang anggotanya cacat agar dapat menikmati manfaat pembangunan
3. Perempuan dan laki-laki diberikan hak-hak yang sama dalam mengajukan komplain atau pengaduan atas kasus-kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

4. Kurangnya kualitas SDM perempuan membuat kemampuan pengusaha perempuan dalam menyelesaikan masalah kegiatan ekonominya adalah rendah, begitu pula dengan kemampuan dalam mengakses dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi regional.

Isu Manfaat terhadap Pembangunan ¹⁶⁾

1. *Need assessment* yang dilakukan sebelum penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan tidak mencerminkan keterwakilan kebutuhan laki-laki dan perempuan dari berbagai kelas sosial. Akibatnya dalam penentuan prioritas program sering terjadi kebutuhan yang menjadi prioritas bagi perempuan menjadi terabaikan.
2. Keberadaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan penggunaannya merupakan salah satu kunci bagi analisis kebutuhan masyarakat baik laki-laki dan perempuan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

CIRI-CIRI KEBIJAKAN/ PROGRAM PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN YANG RESPONSIF GENDER ¹⁷⁾

1. Perencanaan program penurunan kemiskinan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.
2. Tersedianya Data Statistik Daerah Terpadu secara terpilah berdasarkan jenis kelamin yang dimulai dengan desain data mentah yang memang sudah terpilah berdasarkan jenis kelamin. Jadi harus ada jaminan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang perintah untuk menyediakan data terpilah dari setiap instansi (mulai dari data mentah sampai data agregat regional) secara terpadu dengan koordinasi rutin antar instansi terkait (BPS dan instansi-instansi di SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang dipantau oleh Pusat Studi Wanita (PSW) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Terdapat struktur organisasi di Pemerintahan daerah yang membawahi urusan gender, yaitu Kantor Pemberdayaan Perempuan.
4. Setiap kebijakan di daerah sudah responsif gender, yaitu menggambarkan sinergisme kinerja pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri atas Kantor, Dinas, dan Lembaga yang semuanya berujung pada pemberdayaan gender dengan dilandasi oleh kebijakan/ program yang responsif gender, melalui penggerakan:
 - a. Motor pengarusutamaan gender adalah budaya organisasi yang responsif gender. Organisasi yang memiliki komitmen untuk membina kesetaraan gender dan menuntut agar setiap karyawan melakukannya. Setiap pegawai baik laki-laki maupun perempuan secara aktif membina kesetaraan gender dalam pekerjaan masing-masing sehari-hari ataupun dalam interaksi antar mereka dengan orang lain.
 - b. Budaya organisasi pengarusutamaan gender adalah sebuah rancangan yang digunakan untuk mengintegrasikan kebutuhan dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam pengambilan keputusan pada setiap tahap perencanaan dan siklus program. Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi pelengkap dalam intervensi yang bertujuan untuk mengatasi adanya kesenjangan gender.
 - c. Terwujud dan terlaksananya kebijakan yang responsif gender, yaitu kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan.
 - d. Setiap pejabat di daerah sudah mempunyai kesadaran gender, yaitu sudah menjawab daftar pertanyaan (*check-list*) bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

- Apakah pejabat sudah memberikan dukungan yang setara kepada penanggulangan kemiskinan yang memberikan kesetaraan kesempatan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap semua program pembangunan?.
 - Apakah pejabat sudah menganalisis permasalahan kemiskinan berdasarkan analisis gender?.
5. Ukuran keberhasilan kebijakan/ program yang responsif gender adalah:
- a. Kebijakan/program/kegiatan pembangunan daerah yang berubah dari “netral dan/atau bias gender” menjadi “sensitif atau bahkan responsif gender”?.
 - b. Indikator kinerja pemerintah daerah (terutama indikator input, proses, output dan *outcome*) menunjukkan adanya penurunan kesenjangan gender.
6. Beberapa tips pengintegrasian isu gender ke dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah:
- a. Tidak harus setiap nama program ada kata-kata “laki-laki dan perempuan” atau “gender”, namun di dalam analisis dan rasional dari keberadaan program sudah dipikirkan adanya penanggulangan isu gender.
 - b. Program yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana ditujukan untuk semua, jadi tidak harus dikaitkan dengan gender secara spesifik, karena program PUG adalah suatu kesatuan besar yang *integrated*.
 - c. Memperkuat SDM yang dapat menjadi *focal point* PUG di lingkungan kerjanya.
 - d. Mengembangkan materi pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan.
 - e. Mengintegrasikan pesan-pesan gender pada panduan penyusunan kebijakan.
 - f. Memastikan bahwa kebijakan daerah harus responsif gender dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki.
 - g. Memastikan penjabaran kebijakan tersebut ke dalam program-program pembangunan daerah yang semakin responsif gender di tingkat masyarakat.
 - h. Memastikan penjabaran program-program tersebut ke dalam kegiatan pembangunan daerah serta alokasi anggaran yang responsif gender (besarnya anggaran APBN dan APBD sama/tidak berubah, namun kebijakan/programnya sudah responsif gender), dengan demikian kebijakan pengarusutamaan gender tidak membutuhkan anggaran tambahan yang terpisah dari kebijakan yang sudah ada.

STRATEGI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN RESPONSIF GENDER MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN

Perencanaan dan Budgeting

1. Perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan yang responsif gender dilandasi atas analisis gender (*Gender Analysis Pathway - Policy Outlook Plan of Action* atau *GAP-POP*).
2. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat, dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan maupun laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.

3. Perencanaan kebijakan yang responsif gender dilakukan setiap 5 tahun sekali (RPJMN dan RPJMD), sedangkan perencanaan program dilakukan setiap tahun dalam rangka menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan (kebijakan jangka pendek seperti Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah).
4. Perencanaan yang responsif gender penting dilakukan dengan tujuan agar tersusun rencana kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan seperti pembangunan ekonomi, hukum, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya.
5. Tahapan perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat, dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan maupun laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Karena perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan. Perencanaan yang responsif gender penting dilakukan dengan tujuan agar tersusun rencana kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan seperti pembangunan ekonomi, hukum, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya.
6. Perencanaan yang responsive gender dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan (*capacity building*) dengan tujuan untuk meningkatkan kesamaan pemahaman tentang gender dan peningkatan komitmen antara para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan dan antar *stakeholders*.
 - a. Kemitraan dengan kelembagaan swadaya masyarakat/ormas bertujuan untuk mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, dan *local wisdom*.
 - b. Penguatan *stakeholders* bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman gender, kesamaan tujuan dan peningkatan komitmen bersama.
 - c. Komitmen bersama ini diwujudkan dalam bentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang khusus menangani program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasi di bawah salah satu institusi pemerintah daerah setempat.
7. Penguatan kelembagaan juga dapat dilakukan melalui pengembangan *website* dan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) lainnya yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan yang berwawasan gender kepada masyarakat luas.
8. Pembentukan kelembagaan PUG pada instansi pemerintah di setiap tingkatan wilayah melalui pembentukan Kelompok Kerja. Tugas Kelompok Kerja adalah:
 - a. Memfasilitasi dialog antar unit yang melaksanakan PUG.
 - b. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan dalam mewujudkan penanggulangan kemiskinan dengan mengintegrasikan isu gender melalui pengembangan ekonomi perempuan.
 - c. Menyusun program kerja dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang berwawasan gender.
 - d. Menyiapkan media komunikasi, informasi dan edukasi untuk membantu unit kerja dalam melaksanakan sosialisasi program penanggulangan kemiskinan yang berwawasan gender.

- e. Membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar focal point PUG dapat bekerja optimal.
 - f. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit masing-masing.
7. Tugas *Focal Point* PUG di Setiap Unit Kerja:
- a. Mendorong dan membantu masing-masing instansinya untuk mereview dan memperbaiki kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dalam penanggulangan kemiskinan agar berwawasan gender.
 - b. Membantu pengambil kebijakan pada unit kerja masing-masing sesuai dengan Tupoksi dan kewenangannya secara terencana dan berkelanjutan agar Program Penanggulangan Kemiskinan sudah berwawasan gender.
 - c. Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan nasional seperti tertera pada RPJMN, Renstra tingkat Nasional maupun daerah, kemudian dikaitkan dengan pengintegrasian isu-isu gender ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan.
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas gender, analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender.
8. *Budgeting*
- Dukungan anggaran terhadap proyek/kegiatan yang telah disusun tersebut, hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Rencana anggaran program penanggulangan kemiskinan dengan memasukkan isu-isu gender dilakukan secara bersama-sama antara lembaga legislatif (DPR/DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dengan lembaga eksekutif (Departemen/ Dinas/ SKPD, Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota).
 - b. Anggaran dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis yang dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan agar dapat mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan.
 - c. Setiap anggaran yang dialokasikan kepada setiap program pembangunan harus berwawasan gender, sehingga disebut sebagai "*gender budgeting*".
 - d. Menekankan pada reorientasi anggaran yang semula mendanai program dan kegiatan yang netral gender menjadi anggaran yang mendanai program dan kegiatan responsif gender.
 - e. Memfokuskan pada penggunaan yang memberi manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan.
 - f. Adanya partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan penganggaran.
 - g. Sesuai dengan keperluannya, anggaran dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan praktis, strategis maupun kebutuhan untuk perempuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan harus memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada perempuan dan laki-laki. Pelaksanaan PUG perlu didukung dan diefektifkan dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

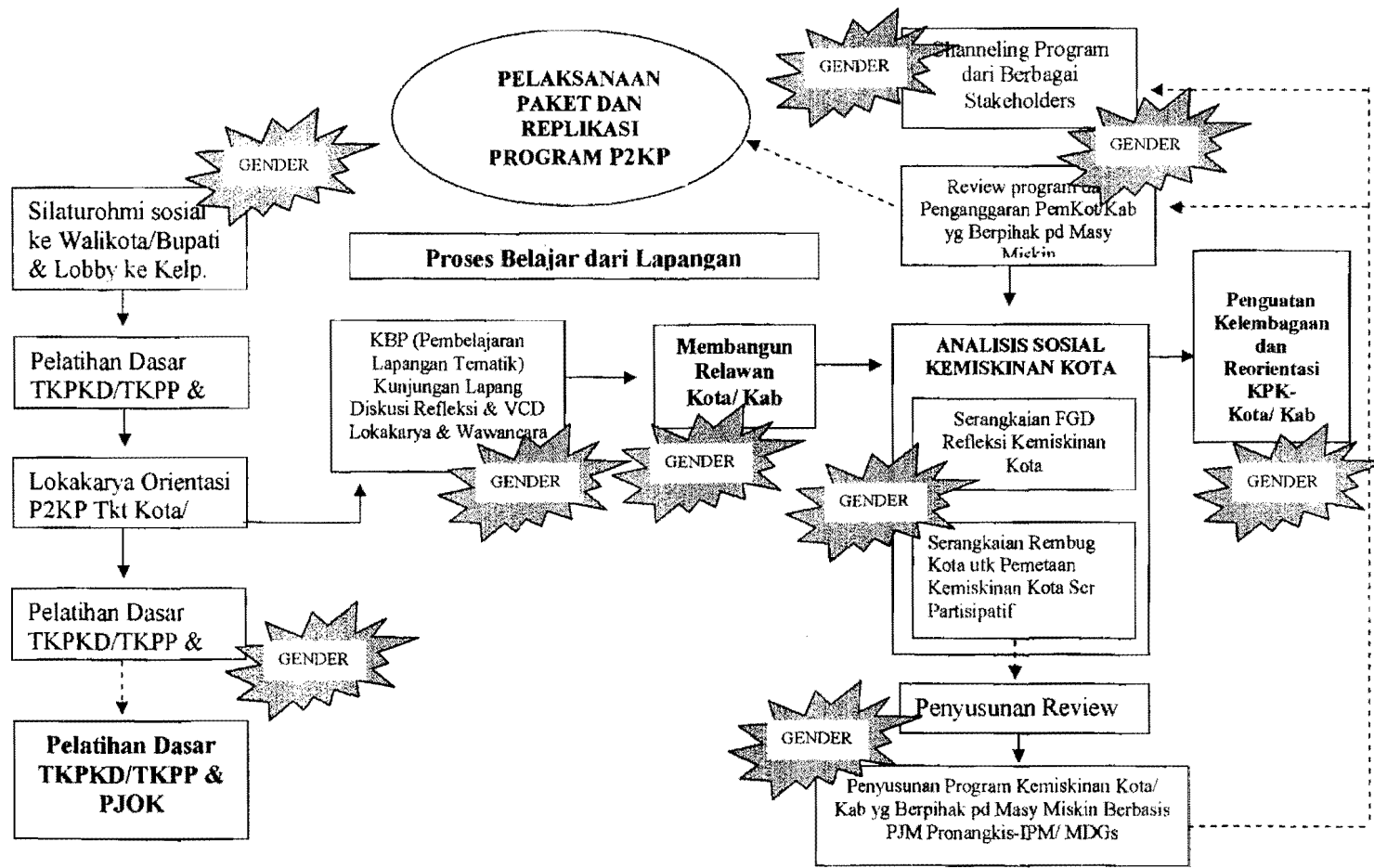
1. Kemampuan para pelaksana pengarusutamaan gender.

2. Penyusunan perangkat analisis, pemantauan dan penilaian.
3. Pembentukan mekanisme pelaksanaan PUG, antara lain:
 - a. Forum komunikasi.
 - b. Kelompok kerja.
 - c. Panitia pengarah (*steering committee*).
 - d. Tim penggerak PUG (*Gender focal point*).
4. Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen ke segenap jajaran pemerintah dan swasta serta di semua tingkatan, provinsi, kabupaten dan kota. Pembentukan mekanisme jejaring kerja yang melibatkan semua *stakeholders* dalam proses PUG.
5. Pembentukan Kelembagaan PUG pada instansi pemerintah di setiap tingkatan wilayah.
6. Pelaksanaan studi kebijakan berwawasan gender dilakukan dengan tujuan untuk menemukan akar permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan faktor sosial budaya sebagai penyebab kesenjangan gender. Hasil studi inilah yang kemudian menemukan isu-isu gender yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan dan sumberdaya manusia.
 - a. Penyajian data terpilah berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk mengembangkan sistem pendataan yang responsif gender dalam rangka penyajian data akurat dan berimbang untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
 - b. Pendekatan program berdasarkan data yang akurat dalam rangka menurunkan kesenjangan gender yang berdampak pada kemiskinan penduduk.
7. Berdasarkan isu kesenjangan gender yang memperlihatkan kondisi perempuan tertinggal dibandingkan dengan kondisi laki-laki, maka fokus perhatian program penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan pada aspek-aspek peran ekonomi perempuan dalam semua sektor, yaitu diarahkan pada peningkatan ekonomi keluarga, pembentukan kelembagaan, dan tingkat keterlibatannya dalam pembangunan di daerahnya.
8. Perkuatan gender ini dapat direalisasikan dengan penyusunan desain strategi dengan mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam kebijakan, program kegiatan, dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan di daerah.

Contoh Proses Pengintegrasian Isu Gender Ke Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimotori oleh Departemen Pekerjaan Umum (Kimpraswil) masih dapat diupayakan pengintegrasian isu gender ke dalam setiap tahapan kegiatan, misalnya ⁶⁾:

1. Tahapan sosialisasi program di tingkat kabupaten/ kota (silaturahmi dan lobi-lobi dengan berbagai pihak baik legislatif, maupun eksekutif, dan pihak-pihak kelompok peduli).
2. Tahapan Pembelajaran lapangan.
3. Tahapan proses membangun relawan untuk tingkat kabupaten/ kota, review program dan penganggaran yang ada saat ini apakah sudah responsif gender dan berpihak pada masyarakat miskin (*Pro-Poor Planning and Budgeting*).
4. Tahapan analisis sosial kemiskinan kota yang dilandasi atas analisis gender.
5. Tahapan usaha-usaha penguatan kelembagaan (*capacity building*) dan reorientasi KPK yang berwawasan gender.
6. Tahapan penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender, dengan melakukan:



Gambar 2. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri P2KP Tingkat Kota/ Kabupaten

→ Urutan Siklus Kegiatan

- b. Penyusunan pedoman-pedoman teknis yang mempertimbangkan analisis gender dan kebutuhan praktis, spesifik dan strategis gender sebagai respon terhadap isu kesenjangan gender dalam pembangunan yang berdampak pada kemiskinan penduduk (seperti pada Pedoman Teknis Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal; Pedoman teknis Pendaftaran relawan dan Pelaksanaa RKM (Rebug Kesiapan Masyarakat); Pedoman Teknis Pelaksanaan Refleksi Kemiskinan (RK); Pedoman Teknis Pelaksanaan Kajian Pemetaan Swadaya (PS); Pedoman Teknis Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM); Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis; Pedoman Teknis Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); Pedoman Teknis Pendampingan Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); dan Pedoman Teknis Petunjuk Pelaksanaan serta SOP-SOP (*Standard Operational Procedures*) lainnya).
- c. Penyusunan rencana yang melibatkan semua kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk mengetahui kebutuhan dan masalah serta potensi masyarakat yang dimiliki.

Tabel 1. Contoh Lingkup Review pada Proses Pengintegrasian Isu Gender Ke Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan.

NO	LINGKUP REVIEW PARTISIPATIF	ASPEK-ASPEK YANG DIREVIEW
1	Review Program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % KK dan % warga yg menerima manfaat P2KP dan program lainnya (baik langsung maupun tak langsung) berdasarkan jenis kelamin dan dianalisis berdasarkan kesenjangan gendernya ▪ % jenis kegiatan yang dialokasikan untuk kelompok perempuan ▪ % keberhasilan atau kesesuaian program dengan keinginan perempuan.
2	Review Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % jml relawan berdasarkan jenis kelamin ▪ % kelompok yang terlibat baik kelompok laki-laki, perempuan dan campuran ▪ Intensitas pertemuan kelompok perempuan dibandingkan dengan kelompok laki-laki ▪ Apakah sudah ada Pokja Gender di Kabupaten/Kota yang menangani kemiskinan berwawasan gender?
3	Review Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % dana yang dialokasikan untuk KK perempuan/ warga perempuan/ kelompok perempuan. ▪ % dana yang berhasil digalang oleh kelompok perempuan dibandingkan dengan kelompok laki-laki ▪ % kemacetan dana pinjaman yang berasal dari anggota perempuan dibandingkan dengan laki-laki

Tabel 2. Contoh Data Pemetaan Swadaya yang Mendukung IPM-MDGs yang Responsif Gender

NO	HASIL PS	IPM MDGs	SUMBER DATA
1	Data KK Miskin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata pendapatan per kapita KK laki-laki dibandingkan dengan KK Perempuan ▪ KK miskin berdasarkan jenis kelamin 	BPS
2	Data Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Status Gizi anak balita berdasarkan jenis kelamin ▪ Status kesehatan anak balita berdasarkan jenis kelamin ▪ Angka kematian balita berdasarkan jenis kelamin ▪ Angka kematian ibu 	BPS
3	Data Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APS, APK mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, PT berdasarkan jenis kelamin ▪ Angka Buta aksara berdasarkan jenis kelamin ▪ Rata-rata lama pendidikan berdasarkan jenis kelamin. 	
4	Data Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ % keterlibatan perempuan dalam program-program pembangunan ▪ % perempuan bekerja dibandingkan dengan perempuan tidak bekerja ▪ Jml kelompok ekonomi perempuan 	

Tabel 3. Contoh Lingkup dan Aspek-Aspek Re-orientasi PJM-Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang Responsif Gender

NO	LINGKUP	ASPEK-ASPEK RE-ORIENTASI
1	Harapan Ke depan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga meningkat ▪ Jumlah kelompok ekonomi perempuan meningkat ▪ Persentase KK miskin berkurang ▪ Status gizi balita meningkat ▪ Angka putus sekolah berkurang
2	Klasifikasi Program Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program terkait dengan peningkatan ekonomi perempuan ▪ Program terkait dengan perkuatan kelembagaan ekonomi perempuan ▪ Program terkait dengan keterlibatan perempuan dalam program dan pembangunan ekonomi di wilayahnya.
3	Klasifikasi Prioritas Program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program yang disepakati bersama yang dianggap sangat penting dan melibatkan representasi dari kelompok perempuan ▪ Program dapat diselesaikan dalam 1 tahun
4	Klasifikasi Pembiayaan Program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program dapat dibiayai dahulu oleh Pemda dan kemudian dibiayai oleh swadaya masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi

1. Teknik Monitoring

Teknik monitoring dapat dilakukan dengan cara : observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kebijakan dan

program, menggali hambatan dalam pelaksanaan program, dan memastikan sampai dimana tujuan dan sasaran telah dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Sebagai contoh, monitoring mencakup :

- a. Se jauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber-sumber daya dan fasilitas-fasilitas pelayanan;
- b. Se jauh mana para staf, mitra kerja, kelompok sasaran, baik perempuan dan laki-laki, telah atau belum berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan tugas-tugas;
- c. Se jauh mana kinerja staf dalam kegiatan telah responsif gender.

2. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi adalah cara yang digunakan dalam melakukan pengkajian hasil status program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, bisa dalam bentuk studi lapangan, analisis data/statistik rutin atau analisis data SENSUS dan lain-lain. Karena itu indikator pencapaian suatu program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sudah ditentukan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang responsif gender dilakukan dengan menganalisis indikator-indikator gender untuk menjawab apakah kebijakan, program dan kegiatan itu memperkecil kesenjangan gender dalam indikator-indikator kemiskinan, atau justru memperlebar kesenjangan atau tetap mempertahankan keadaan seperti semula. Konsultasi dan partisipasi perempuan dalam proses evaluasi dapat menjadi masukan dalam mengidentifikasi implikasi, kebijakan, program dan kegiatan terhadap perubahan kesenjangan terutama yang dialami perempuan.

Program-Program Peningkatan Ekonomi Perempuan

1. Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) ¹⁴⁾

- a. Kebijakan PPEP bertujuan untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa, dengan cara:

- Meningkatkan kapasitas SDM perempuan Indonesia.
 - Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan.
 - Memperkuat peran/ posisi tawar (*bargaining position*) kaum perempuan dalam mengakses informasi, teknologi, sumberdaya ekonomi, permodalan, perbankan, pemasaran dan pasar.
- b. Kebijakan yang dilakukan:
- Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam sektor pelaksana program pemberdayaan ekonomi rakyat.
 - Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui pembinaan kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil oleh lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
 - Pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
 - Pengembangan model desa perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam pengembangan respon sosial masyarakat.
- c. Strategi yang dilakukan:
- Pelaksanaan pemberdayaan melalui sistem kelembagaan kelompok.
 - Program pemberdayaan spesifik sesuai kebutuhan kelompok sasaran.
 - Pengembangan kelembagaan keuangan mikro tingkat lokal.
 - Penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif.
 - Pengembangan usaha ekonomi produktif yang berkesinambungan.
 - Pelibatan keluarga/ suami kelompok sasaran.
 - Keterpaduan peranserta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
 - Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha.
 - Fasilitas bantuan permodalan bersifat dana bergulir untuk pemupukan permodalan.
 - Pemantapan sistem pendampingan untuk kemandirian kelompok.

2. Pelaksanaan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) ¹⁶⁾

- a. Pelaksanaan Model desa PRIMA ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan secara terpadu dan bersinergi melalui pengurangan beban biaya pada keluarga miskin di bidang kesehatan dan pendidikan, dengan cara:
- Stimulasi pengembangan usaha perempuan melalui ketrampilan perempuan.
 - Meningkatkan partisipasi kaum perempuan di dunia usaha.
 - Meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin.
 - Meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi, teknologi tepat guna dan berbagai sumber pembiayaan.
 - Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.
- b. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan pada desa Prima, khususnya bagi kelompok perempuan miskin menjadi prioritas. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha merupakan suatu upaya yang saling berkaitan, mulai dari peningkatan sumberdaya manusianya (dari segi kualitasnya yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya dan lingkungan) hingga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam penentuan usahanya.
- c. Peningkatan kapasitas perempuan meliputi peningkatan akses informasi bagi kelompok perempuan, peningkatan keikutsertaan kaum perempuan pada kegiatan ekonomi, mulai dari perencanaan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan hingga

- pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan itu sendiri, agar perempuan mempunyai kemampuan kontrol terhadap sumberdaya serta menerima manfaat yang maksimal dari pembangunan.
- d. Skema pengelolaan dana stimulan dengan peningkatan kesejahteraan melalui Lembaga keuangan Mikro (LKM) bersama-sama dengan Kepala Desa setempat.

PENUTUP

Sebagai penutup dari bab ini adalah perlunya pengintegrasian isu gender ke dalam program penurunan kemiskinan agar program tersebut lebih efektif dan berdampak pada kesenjangan gender dalam pembangunan yang merupakan penyebab dominan dalam kemiskinan. Mudah-mudahan tulisan ini dapat dijadikan masukan dalam penerapan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang responsif gender dengan memfokuskan lebih besar kepada kondisi perempuan agar dapat meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan ekonomi keluarga dan bangsa Indonesia. Akhirnya, peran dan fungsi institusi-institusi pemerintah harus dioptimalkan agar pembangunan dapat terwujud dengan maksimal bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia dan Lembaga Penelitian Smeru. 2001. Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan. Lembaga Penelitian Smeru, Jakarta.
2. BPS-BAPPENAS-UNDP. 2004. Indonesia Laporan pembangunan Manusia 2004: Ekonomi dan Demokrasi.
3. Budiharsono, S. 2004a. Kondisi dan Penyebab Kemiskinan Multidimensi di Indonesia. TKP3KPK. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Budiharsono, S. 2004b. Dokumen Ringkas: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Sekretariat TKP3KPK. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
5. Departemen Dalam Negeri. 2003. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah.
6. Departemen Pekerjaan Umum. 2007. Petunjuk Pelaksanaan PNPM MANDIRI-P2KP 2007. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
7. Direktorat Pemukiman dan Perumahan, Bappenas. Tanpa Tahun. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa untuk Mengatasi Kemiskinan. Bappenas, Jakarta.
8. FAO. 2005 (modified). *SEAGA (Socio Economic And Gender Analysis) for Emergency and Rehabilitation Programme Guideline*.
9. Gema PKM Indonesia (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia). 2003. Kemiskinan dan Keuangan Mikro. Gema PKM Indonesia, Jakarta.
10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2000. Panduan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2001. Pemantapan Kesepakatan Mekanisme Operasional Pengarusutamaan Gender Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional dan Daerah: Bagian I dan II. Rakernas Pemberdayaan PP & KPA.

12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2003. Gender Checklist dalam Pembangunan. Presentase.
13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2004a. Bunga Rampai: Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA.
14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2004b. Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI.
15. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2005a. Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA.
16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2005b. Pedoman Umum Pelaksanaan Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI.
17. Kementerian Perumahan Rakyat. 2006. Peran Perempuan Dalam Program Pembangunan Perumahan Swadaya. Kerjasama Menpera-PT. Delima Laksana Tata J/O PT Nara Sumatera Hara.
18. Lembaga Administrasi Negara (LAN)- Departemen Dalam Negeri. Draft Modul *Gender Awareness*. SCBD-ADB.
19. Sekretariat KKPM. 2004. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Bappenas. Komite Penanggulangan Kemiskinan.
20. Sekretariat TKP3KPK. 2004. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
21. TKP3 KPK. 2004. Proses Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
22. TKP3 KPK. 2004. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
23. TKP3 KPK. 2004. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perluasan Kesempatan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
24. TKP3 KPK. 2004. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Rentan dan Miskin. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
25. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 2005. Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Jakarta.
26. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 2006. Panduan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Jakarta.
27. UNDP. 2004. Human Development Report.
28. World Bank. 2006a. Membuat Pelayanan Bermanfaat bagi Masyarakat Miskin di Indonesia: Titik Fokus untuk Mencapai Keberhasilan di Lapangan. Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta.
29. World Bank. 2006b. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Ikhtisar), Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta. World Bank. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta. 2006b.
30. World Bank. 2006c. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta.

CURRICULUM VITAE PENYAJI

Nama	: Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.
Pendidikan	: S1 Agribisnis, Fak Pertanian, IPB S2 <i>Family & Consumer Sciences, Iowa State Univ., USA</i> S2 <i>Family Sociology, Iowa State Univ., USA</i> S3 Gizi Masyarakat & Sumberdaya Keluarga, IPB
Pekerjaan	: <ul style="list-style-type: none">▪ Dosen S1 di Dept. IKK-FEMA IPB▪ Dosen S2 dan S3 di Dept. IKK-FEMA IPB▪ Peneliti Pada PSW-PSP3 LPPM-IPB
Jabatan Lain	: Anggota Tim Pakar Gender Nasional - Kelompok Kerja Gender-Depdiknas Pusat
Alamat	: Dept. IKK-FEMA-IPB Jl. Puspa- Kampus IPB Darmaga Telpkantor: (0251) 8621258/ 8628303; Fax: (0251) 8622276 HP 08 1111 0920; R: (0251) 8639524 E-mail: herien_puspitawati@email.com